



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUH. IDHAM KHALID
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 674819

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/42 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI
2. Tanah Seluas 126 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

1. MOBIL, WULING CONFERO1.5C-8 SEATER Tahun 2017, HASIL SENDIRI
2. MOBIL, WULING CORTEZ1.8C Tahun 2018, HASIL SENDIRI

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

488.525.012

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURSEHA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 487931

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

1. Tanah dan Bangunan Seluas 176 m2/154 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

1. MOBIL, HONDA DG48 1.5 RS CVT MINIBUS Tahun 2024, HASIL SENDIRI

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

576.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RATNIANGSA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 234707

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

1. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/216 m2 di KAB / KOTA
PARIGI MOUTONG, HASIL SENDIRI

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL
SENDIRI
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL
SENDIRI
4. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, WARISAN

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.

D. SURAT BERHARGA Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS Rp.

F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp.

III. HUTANG Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 982.114.749

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI ARIANI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **726402**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 237 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.**

1. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL/SCOOTER Tahun 2011, HASIL SENDIRI
2. MOBIL, HONDA JAZZ GE8 1.5 E M.T Tahun 2013, HASIL SENDIRI
3. MOBIL, DAIHATSU F651RV-GMDFJ (4X2) M/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.**

D. SURAT BERHARGA **Rp.**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.**

F. HARTA LAINNYA **Rp.**

Sub Total **Rp.**

III. HUTANG **Rp.**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **992.144.817**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

UNIT KERJA : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JELY ROMPAS
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 782630

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

1. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU ,

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

1. MOBIL, SUZUKI 1 KIFS (4X2)A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

385.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUNASHIR**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **768719**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

1. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2010, HASIL SENDIRI
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI
3. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

140.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.